



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Handwritten signature

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2/93/2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28/24.2

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati memberikan Delegasi kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

58/24.2

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 118); dan
- b. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf pemrakarsa		Paraf
Kepala DPMPTSP	Hariman Budi Anggoro, ST, MT	
Sekretaris DPMPTSP	Ir. H. Yadi Heryadi, MT	
Penata Perizinan Ahli Madya	Dicky Yogapranata, S.STP., M.Si	

Paraf koordinasi		Paraf
Sekretaris Daerah	Norman Nugraha	
Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan Pembangunan	dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	
Kepala Bagian Hukum	Suntama, SH, M.Si	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

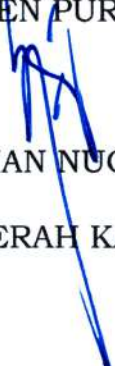
BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



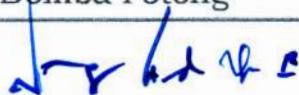
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 43 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 Juni 2025
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
A.	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221
2.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222
3.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223
4.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224
5.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225
6.	Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Tawar	03226
7.	Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	03227
8.	Sertifikat Standar Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229
9.	Sertifikat Standar Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau	03251
10.	Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Payau	03252
11.	Sertifikat Standar Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	03253
12.	Sertifikat Standar Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau	03254
13.	Sertifikat Standar Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255
14.	Sertifikat Standar Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259
15.	Izin Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan bersirip di perairan darat	03121
16.	Izin Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat	03122
17.	Izin Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	03123
18.	Izin Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124
19.	Izin Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125
20.	Izin Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126
21.	Izin Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129
22.	Surat Izin Usaha Perikanan	PB UMKU
B.	SEKTOR PERTANIAN	
23.	Sertifikat Standar Budi Daya Kuda dan Sejenisnya	01420
24.	Sertifikat Standar Pembibitan Domba Potong	01441



NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
25.	Sertifikat Standar Budi Daya Domba Potong	01441
26.	Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Potong	01442
27.	Sertifikat Standar Budi Daya Kambing Potong	01442
28.	Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Perah	01443
29.	Sertifikat Standar Budi Daya Kambing Perah	01443
30.	Sertifikat Standar Pembibitan Domba Perah	01444
31.	Sertifikat Standar Budi Daya Domba Perah	01444
32.	Sertifikat Standar Produksi Bulu Domba Mentah/ <i>Raw Wool</i>	01445
33.	Sertifikat Standar Peternakan Babi	01450
34.	Sertifikat Standar Budi Daya Burung Puyuh	01466
35.	Sertifikat Standar Pembibitan Rusa	01494
36.	Sertifikat Standar Budi Daya Rusa	01494
37.	Sertifikat Standar Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	01495
38.	Sertifikat Standar Usaha Rumah Sarang Burung Walet	01497
39.	Sertifikat Standar Usaha Pencucian Sarang Burung Walet	01497
40.	Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet	01497
41.	Sertifikat Standar Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621
42.	Sertifikat Standar Jasa Perkawinan Ternak	01622
43.	Sertifikat Standar Jasa Penetasan Telur	01623
44.	Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging bukan Unggas	10110
45.	Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	10120
46.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130
47.	Sertifikat Standar Industri Pengawetan Kulit	15111
48.	Sertifikat Standar Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	47229
49.	Sertifikat Standar <i>Ambulatori</i>	75000
50.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Jagung	01111
51.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Jagung	01111
52.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Gandum	01112
53.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Gandum	01112
54.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Kedelai	01113
55.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kedelai	01113
56.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Kacang Tanah	01114
57.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kacang Tanah	01114
58.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Kacang Hijau	01115
59.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kacang Hijau	01115
60.	Sertifikat Standar Budi Daya Aneka Kacang Hortikultura	01116
61.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Serelia Lainnya, Aneka Kacang	01119

Handwritten signature

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
62.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Serelia Lainnya, Aneka Kacang	01119
63.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Padi Hibrida	01121
64.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Padi Hibrida	01121
65.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Padi Inbrida	01122
66.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Padi Inbrida	01122
67.	Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Aneka Umbi Palawija	01135
68.	Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Aneka Umbi Palawija	01135
69.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	10611
70.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>Leguminous</i>)	10612
71.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>)	10613
72.	Sertifikat Standar Industri Pati Ubi Kayu	10621
73.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	10631
74.	Sertifikat Standar Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	10632
75.	Sertifikat Standar Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612
76.	Sertifikat Standar Jasa Pascapanen	01630
77.	Sertifikat Standar Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	01640
78.	Sertifikat Standar Jasa Pemanenan	01613
79.	Sertifikat Standar Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan melalui Udara	01614
80.	Sertifikat Standar Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619
81.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Daun	01131
82.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah	01132
83.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Buah	01133
84.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Umbi	01134
85.	Sertifikat Standar Budi Daya Jamur	01136
86.	Sertiikat Standar Budi Daya Sayuran Lainnya	01139
87.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Bunga	01193
88.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Anggur	01210
89.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220
90.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Jeruk	01230
91.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	01240
92.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Beri	01251
93.	Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Tahunan	01253
94.	Sertifikat Standar Budi Daya Buah Semak Lainnya	01259

Handwritten signature/initials

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
95.	Sertifikat Standar Budi Daya Cabai	01283
96.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285
97.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Obat atau Biofarmaka Nonrimpang	01286
98.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Hias	01301
99.	Sertifikat Standar Budi Daya Kapas	01118
100.	Sertifikat Standar Budi Daya Tembakau	01150
101.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Penutup Tanah	01191
102.	Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Semusim Lainnya	01199
103.	Sertifikat Standar Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis (Budi Daya Kurma)	01220
104.	Sertifikat Standar Pertanian Buah Biji Kacang-kacangan (Budi Daya Jambu Mete)	01252
105.	Sertifikat Standar Perkebunan Buah Kelapa (Budi Daya Kelapa)	01261
106.	Sertifikat Standar Budi Daya Kopi, Kakao	01270
107.	Sertifikat Standar Perkebunan Lada	01281
108.	Sertifikat Standar Perkebunan Cengkeh	01282
109.	Sertifikat Standar Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284
110.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Budi Daya Ginseng)	01285
111.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Nonrimpang (Budi Daya Kina, Adas, Pinang, Gambir)	01286
112.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Rempah-rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	01289
113.	Sertifikat Standar Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291
114.	Sertifikat Standar Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299
115.	Sertifikat Standar Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	01117
116.	Sertifikat Standar Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis bukan Tebu	01137
117.	Sertifikat Standar Pertanian Tanaman Berserat	01160
118.	Sertifikat Standar Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya	01269
119.	Izin Pembibitan Sapi Potong	01411
120.	Izin Budi Daya Sapi Potong	01411
121.	Izin Pembibitan Sapi Perah	01412
122.	Izin Budi Daya Sapi Perah	01412
123.	Izin Pembibitan Kerbau Potong	01413
124.	Izin Budi Daya Kerbau Potong	01413
125.	Izin Pembibitan Kerbau Perah	01414
126.	Izin Budi Daya Kerbau Perah	01414
127.	Izin Peternakan Babi	01450
128.	Izin Budi Daya Ayam Ras Pedaging	01461

54/24. E

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
129.	Izin Budi Daya Ayam Ras Petelur	01462
130.	Izin Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463
131.	Izin Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	01464
132.	Izin Pembibitan Itik dan/atau Bebek	01465
133.	Izin Budi Daya Itik dan/atau Bebek	01465
134.	Izin Pembibitan Burung Puyuh	01466
135.	Izin Pembibitan Ayam Ras	01468
136.	Izin Jasa Penetasan Telur	01623
137.	Izin Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan bukan di Apotik	47726
138.	Izin Klinik Hewan	75000
139.	Izin Rumah Sakit Hewan	75000
140.	Izin Budi Daya Perkebunan Tebu	01140
141.	Izin Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262
142.	Izin Budi Daya Teh	01270
143.	Izin Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	10431
144.	Izin Industri Gula Pasir	10721
145.	Izin Industri Pengolahan Teh	10763
146.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	PB UMKU
147.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)	PB UMKU
148.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Asing)	PB UMKU
149.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Indonesia)	PB UMKU
150.	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	PB UMKU
151.	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	PB UMKU
152.	Registrasi Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	PB UMKU
C.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
153.	Sertifikat Standar Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011
154.	Sertifikat Standar Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012
155.	Sertifikat Standar <i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021
156.	Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi	02209
157.	Sertifikat Standar Penyediaan Massa Air	02209
158.	Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Aliran Air	02209
159.	Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120
160.	Izin <i>Treatment</i> dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220
161.	Izin <i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022
162.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi	02209

Handwritten signature/initials

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
163.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air pada Kawasan Konservasi	02209
164.	Izin Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi	02209
D.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
165.	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	PB UMKU
E.	SEKTOR PERINDUSTRIAN	
166.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221
167.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222
168.	Sertifikat Standar Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433
169.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510
170.	Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520
171.	Sertifikat Standar Industri Sirop	10723
172.	Sertifikat Standar Industri Air Minum dan Air Mineral	11050
173.	Sertifikat Standar Industri Air Minum Isi Ulang	11052
174.	Sertifikat Standar Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121
175.	Sertifikat Standar Industri Kain Tenun Ikat	13122
176.	Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Benang	13131
177.	Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Kain	13132
178.	Sertifikat Standar Industri Pencetakan Kain	13133
179.	Sertifikat Standar Industri Tekstil Lainnya (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya)	13999
180.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111
181.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112
182.	Sertifikat Standar Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	14120
183.	Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	14131
184.	Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	14132
185.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	14200
186.	Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301
187.	Sertifikat Standar Industri Pengawetan Kulit	15111
188.	Sertifikat Standar Industri Penyamakan Kulit	15112
189.	Sertifikat Standar Industri Pencelupan Kulit Bulu	15113
190.	Sertifikat Standar Industri Kulit Buatan/Imitasi	15114
191.	Sertifikat Standar Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	15121

Handwritten signature/initials in blue ink.

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
192.	Sertifikat Standar Industri Bubur Kertas (Pulp)	17011
193.	Sertifikat Standar Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212
194.	Sertifikat Standar Industri Bahan Peledak	20292
195.	Sertifikat Standar Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	21014
196.	Sertifikat Standar Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111
197.	Sertifikat Standar Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210
198.	Sertifikat Standar Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	22230
199.	Sertifikat Standar Industri Barang Plastik Lembaran	22291
200.	Sertifikat Standar Industri Kaca Lembaran	23111
201.	Sertifikat Standar Industri Kaca Pengaman	23112
202.	Sertifikat Standar Industri Kaca Lainnya	23119
203.	Sertifikat Standar Industri Semen	23941
204.	Sertifikat Standar Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	23955
205.	Sertifikat Standar Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	23956
206.	Sertifikat Standar Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	24103
207.	Sertifikat Standar Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	25113
208.	Sertifikat Standar Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	25920
209.	Sertifikat Standar Industri Lampu dari Logam	25995
210.	Sertifikat Standar Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	26110
211.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	26310
212.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)	26320
213.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420
214.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Fotografi	26710
215.	Sertifikat Standar Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	26791
216.	Sertifikat Standar Industri Teropong dan Instrumen Optik bukan Kaca Mata	26792
217.	Sertifikat Standar Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	27201
218.	Sertifikat Standar Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	27203
219.	Sertifikat Standar Industri Kabel Serat Optik	27310
220.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510
221.	Sertifikat Standar Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520
222.	Sertifikat Standar Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	28172

Handwritten signature/initials

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
223.	Sertifikat Standar Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	28173
224.	Sertifikat Standar Industri Mesin Fotokopi	28174
225.	Sertifikat Standar Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29101
226.	Sertifikat Standar Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	29102
227.	Sertifikat Standar Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	30300
228.	Sertifikat Standar Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911
229.	Sertifikat Standar Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	33152
230.	Sertifikat Standar Reparasi Pesawat Terbang	33153
231.	Sertifikat Standar Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35301
232.	Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	62021
233.	Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029
234.	Sertifikat Standar Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan Dengan Itu	63112
235.	Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209
236.	Sertifikat Standar Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance (QA)</i> , dan <i>Quality Control (QC)</i>	71206
237.	Sertifikat Standar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	72104
238.	Sertifikat Standar Aktivitas Perancangan Khusus	74100
239.	Sertifikat Standar Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	77391
240.	Izin Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411
241.	Izin Industri Margarin	10412
242.	Izin Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437
243.	Izin Industri Tepung Terigu	10616
244.	Izin Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623
245.	Izin Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	10635
246.	Izin Industri Gula Pasir	10721
247.	Izin Industri Kakao	10731
248.	Izin Industri Makanan Bayi	10791
249.	Izin Industri <i>Malt</i>	11032
250.	Izin Industri Air Kemasan	11051
251.	Izin Industri Sigaret Kretek Tangan	12011
252.	Izin Industri Rokok Putih	12012
253.	Izin Industri Sigaret Kretek Mesin	12013
254.	Izin Industri Rokok Lainnya	12019
255.	Izin Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok Lainnya	12099

28/2/20

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
256.	Izin Industri Pemintalan Benang Jahit	13113
257.	Izin Industri Kain Pita	13991
258.	Izin Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992
259.	Izin Industri <i>Nonwoven</i>	13993
260.	Izin Industri Kain Ban	13994
261.	Izin Industri Kertas Berharga	17013
262.	Izin Industri Kertas Khusus	17014
263.	Izin Industri Pencetakan Khusus	18112
264.	Izin Industri Karet Buatan	20132
265.	Izin Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301
266.	Izin Industri Serat <i>Stapel</i> Buatan	20302
267.	Izin Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	21011
268.	Izin Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101
269.	Izin Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	24102
270.	Izin Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201
271.	Izin Industri Senjata dan Amunisi	25200
272.	Izin Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320
273.	Izin Industri Kendaraan Perang	30400
274.	Izin Industri Produksi Radioisotop	32906
275.	Izin Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	32907
276.	Izin Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	33112
277.	Izin Konstruksi Gedung Industri	41013
278.	Izin Kawasan Industri	68130
279.	Izin Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu	71102
280.	Izin Jasa Sertifikasi	71201
281.	Izin Jasa Pengujian Laboratorium	71202
282.	Izin Jasa Inspeksi Periodik	71203
283.	Izin Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	71204
284.	Izin Jasa Kalibrasi/Metrologi	71205
285.	Izin Analisa dan Uji Teknis Lainnya	71209
286.	Izin Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya)	74909
287.	Izin Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	77301
288.	Izin Aktivitas Pengepakan	82920
F.	SEKTOR PERDAGANGAN	
289.	Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C	47221
290.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	PB UMKU
291.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	PB UMKU

Handwritten signature/initials

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
292.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	PB UMKU
293.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	PB UMKU
294.	Tanda Daftar Gudang	PB UMKU
295.	Izin Penggunaan Toko	-
296.	Izin Penggunaan Kios	-
297.	Izin Penggunaan Los	-
298.	Izin Penggunaan Pelataran	-
G.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
299.	Persetujuan Bangunan Gedung	-
300.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota	PB UMKU
301.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	PB UMKU
302.	Izin Reklame	-
303.	Keterangan Rencana Kabupaten	-
H.	SEKTOR TRANSPORTASI	
304.	Sertifikat Standar Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau	52222
305.	Sertifikat Standar Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan	52223
306.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	50211
307.	Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang	50228
308.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Khusus	49216
309.	Sertifikat Standar Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	49219
310.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	49229
311.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	50212
312.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Yang Berhubungan Dengan Itu	50213
313.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221
314.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	50222
315.	Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	50223
316.	Sertifikat Standar Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415
317.	Sertifikat Standar Angkutan Taksi	49421
318.	Sertifikat Standar Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)	52215
319.	Sertifikat Standar Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	49429

Handwritten signature/initials

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
320.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Perbatasan	49212
321.	Sertifikat Standar Angkutan Bus Kota	49214
322.	Sertifikat Standar Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek	49411
323.	Sertifikat Standar Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek	49413
324.	Sertifikat Standar Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	49414
325.	Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang	50218
326.	Izin Angkutan Jalan Rel Wisata	49442
327.	Izin Angkutan Jalan Rel Lainnya	49450
328.	Izin Konstruksi Jalan Rel	42103
329.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	PB UMKU
330.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	PB UMKU
331.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	PB UMKU
332.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	PB UMKU
333.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	PB UMKU
334.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	PB UMKU
335.	Peningkatan Perkeretaapian Khusus	PB UMKU
I.	SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN	
336.	Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional	21022
337.	Sertifikat Standar Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit pada Bangunan, Permukiman, Industri dan Tempat Usaha Lainnya di Wilayah	81290
338.	Sertifikat Standar Aktivitas Puskesmas	86102
339.	Sertifikat Standar Klinik Pemerintah	86104
340.	Sertifikat Standar Klinik Swasta	86105
341.	Sertifikat Standar Griya Sehat	86901
342.	Sertifikat Standar Rumah Sakit Kelas Pratama	86903
343.	Izin Apotek	47721
344.	Izin Toko obat	47722
345.	Izin Toko Obat (Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi)	47842
346.	Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D	86101
347.	Izin Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D	86103
348.	Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama	86903
349.	Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya	86903
350.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	PB UMKU
351.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	PB UMKU
352.	Sertifikat Laik Sehat Akomodasi	PB UMKU
353.	Sertifikat Laik Sehat Tempat Hiburan	PB UMKU
354.	Sertifikat Laik Sehat Tempat Rekreasi	PB UMKU
355.	Sertifikat Laik Sehat Tempat Olahraga	PB UMKU

Handwritten signature/initials

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
356.	Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga	PB UMKU
357.	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan	PB UMKU
358.	Surat Izin Praktik Dokter	-
359.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	-
360.	Surat Izin Praktik Perawat	-
361.	Surat Izin Praktik Bidan	-
362.	Surat Izin Praktik Apoteker	-
363.	Surat Izin Praktik Elektromedis	-
364.	Surat Izin Praktik Fisioterapis	-
365.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	-
366.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	-
367.	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis	-
368.	Surat Izin Praktik Perekam Medis	-
369.	Surat Izin Praktik Radiografer	-
370.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	-
371.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	-
372.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	-
373.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	-
374.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	-
375.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	-
376.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-
377.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	-
378.	Surat Izin Praktik Optometris	-
379.	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis	-
380.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	-
381.	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	-
382.	Surat Izin Praktik Ortotis Protektis	-
383.	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis	-
384.	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah	-
385.	Surat Izin Praktik Audio Logis	-
386.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	-
J.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
387.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta	78421
388.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	78422
389.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	78423
390.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	78424
391.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	78425
392.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	78426
393.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	78427

NO	JENIS LAYANAN	KBLI/KET.
394.	Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	78429
K.	SEKTOR KOPERASI	
395.	Izin Koperasi Simpan Pinjam Primer	64141
396.	Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer	64142
397.	Izin Koperasi Simpan Pinjam Sekunder	64143
398.	Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder	64144
399.	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer	64145
400.	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer	64146
401.	Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder	64147
402.	Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder	64148
L.	SEKTOR PENATAAN RUANG	
403.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha	-
404.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha	-
405.	Penetapan Lokasi	-
M.	SEKTOR PENDIDIKAN	
406.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	-
407.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	-
408.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	-
409.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar	-
410.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-
411.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	-
N.	SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
412.	Surat Keterangan Penelitian	-

Paraf pemrakarsa		Paraf
Kepala DPMPTSP	Hariman Budi Anggoro, ST, MT	
Sekretaris DPMPTSP	Ir. H. Yadi Heryadi, MT	
Penata Perizinan Ahli Madya	Dicky Yogapranata, S.STP., M.Si	

Paraf koordinasi		Paraf
Sekretaris Daerah	Norman Nugraha	
Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan Pembangunan	dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	
Kepala Bagian Hukum	Suntama, SH, M.Si	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN